



**SEJARAH SEKOLAH SWASTA DI KOTA DEPOK
MASA AKHIR ORDE BARU HINGGA AWAL ERA REFORMASI
1998-2004**

Eva Natalia Situmorang

Alumni Program Pascasarjana FIPS, Universitas Indraprasta PGRI

Email: vanatalia87@gmail.com

Abstract

The writing of this article departs from issues regarding education today, where the discourse on commercialization and privatization in the world of education in Indonesia has strengthened after the reform era. The purpose of writing this article is to describe the process of educational institutions (private schools), in the face of changes in government policies that provide space for the private sector to participate in education at the local level of the city of Depok during the Reformation era. The writing of this article uses document and oral sources (interviews), the source documents are obtained through the Depok city government archives and documents from the Ministry of Education and Culture. Oral sources (interviews) were obtained through interviews with officials in the education environment of the city of Depok and managers of private schools in the city of Depok. This study shows the results that the emergence of private schools in Depok during the reform era was determined by the increasing number of people living in the city of Depok, which resulted in higher access to educational needs on the one hand and on the other hand the local city government (Depok) had limitations. in providing educational services for the people of Depok. The choice to provide space for private sector participation in the implementation of education in the city of Depok is an unavoidable choice. Based on this explanation, the issues regarding the commercialization and privatization of education that arose during the reform era, in the case of the local level of the city of Depok, were not a form of relinquishing government responsibility, but rather a policy response stemming from rapid social change (the population growth rate in Depok is quite high. high) at the beginning of the reform era.

Keywords: Depok City, Private School, Reformation Period.

Abstrak

Penulisan artikel ini berangkat dari isu-isu mengenai pendidikan dewasa ini, dimana wacana mengenai komersialisasi dan privatisasi dalam dunia pendidikan di Indonesia menguat pasca era reformasi. Tujuan penulisan artikel ini adalah mendeskripsikan prosesual Lembaga-lembaga pendidikan (Sekolah-sekolah Swasta), dalam menghadapi perubahan kebijakan pemerintah yang memberikan ruang bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam dunia pendidikan di tingkat lokal Kota Depok pada masa era Reformasi. Penulisan artikel ini menggunakan sumber dokumen dan lisan (wawancara), sumber dokumen didapat melalui arsip pemerintahan Kota Depok dan dokumen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sumber lisan (wawancara) didapat melalui wawancara terhadap pejabat dilingkungan pendidikan Kota Depok dan pengelola sekolah swasta di Kota Depok. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa munculnya sekolah-sekolah swasta di Depok pada masa era reformasi ditentukan oleh semakin banyak jumlah penduduk yang bermukim di Kota Depok, yang berdampak berupa akses kebutuhan pendidikan yang semakin tinggi di satu sisi dan disisi lain pemerintahan kota setempat (Depok) memiliki keterbatasan dalam memberikan pelayanan pendidikan untuk masyarakat Depok. Pilihan untuk memberikan ruang bagi partisipasi sektor swasta dalam



WIKSA: PROSIDING PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

pelaksanaan pendidikan di Kota Depok, menjadi pilihan yang tidak dapat dihindarkan. Berdasarkan penjelasan tersebut isu-isu mengenai komersialisasi dan privatisasi pendidikan yang muncul pada era reformasi sejatinya dalam kasus tingkat lokal Kota Depok bukanlah sebuah bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah melainkan respon kebijakan yang berasal dari perubahan sosial yang cukup cepat (laju pertumbuhan penduduk di Kota Depok yang cukup tinggi) pada masa awal era reformasi.

Kata Kunci: Kota Depok, Masa Reformasi, Sekolah Swasta.

PENDAHULUAN

Isu-isu mengenai komersialisasi pendidikan merupakan isu sentral yang tidak hanya dihadapi oleh masyarakat di Indonesia, akan tetapi juga dihadapi oleh masyarakat dunia dewasa ini. Kesadaran masyarakat global tentang pentingnya dunia pendidikan telah membawa dunia pendidikan tidak lagi berdiri sebagai kebutuhan yang sekunder atau tersier, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan pokok (primer). Isu tentang komersialisasi pendidikan umumnya mendera pemerintahan yang dihadapkan kepada tingginya kebutuhan masyarakatnya untuk mendapatkan akses pendidikan di satu sisi, dan disisi lain terdapat

keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan yang layak bagi masyarakatnya (Winarno, 2014: 378). Pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat kemudian semakin tidak dapat dipenuhi, manakala kebutuhan lain untuk masyarakat juga meningkat seperti kesehatan, transportasi, perumahan penduduk dan lain sebagainya juga perlu untuk dipenuhi secara cepat. Maka kebutuhan untuk menggandeng atau memberikan peranan kepada sektor swasta untuk dapat berpartisipasi dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat tidak dapat dihindari.

Kota Depok adalah Kota dipinggiran Kota Jakarta yang menghadapi persoalan mengenai

pemenuhan akses terhadap pendidikan yang layak dan berkualitas bagi warganya, dan hal ini terjadi pada periode akhir pemerintahan Orde Baru yang secara luas membuka pintu bagi masuknya penduduk yang bekerja di Jakarta untuk bermukim di Kota Depok. Pembangunan Kota Jakarta yang dilakukan oleh Presiden Soeharto sejak periode akhir tahun 1960-an, telah memberikan dampak kebutuhan pemukiman penduduk yang semakin besar bagi masyarakat Kota Jakarta. Kota Depok kemudian dipilih untuk menjadi Kota satelit, untuk memenuhi kebutuhan pemukiman penduduk Kota Jakarta yang semakin meningkat pada periode pertengahan tahun 1990-an. Keberadaan Kota Depok yang berada di sebelah selatan Kota Jakarta, memungkinkan untuk menampung penduduk urban yang bekerja di Kota Jakarta karena keberadaan sarana transportasi

yang menghubungkan antara Kota Jakarta dengan Bogor.

Proyeksi Kota Depok sebagai pendukung Kota Jakarta, sejatinya telah dimulai sejak tahun 1974, ketika Gubernur Jakarta Ali Sadikin membuka jalan untuk membangun pemukiman Perumnas di pinggiran Kota Jakarta. Kehadiran kaum urban Jakarta yang bermukim di Kota Depok semakin berkembang pada tahun 1990-an dan hal ini memberikan implikasi terhadap pemenuhan kebutuhan penduduk yang berada di Kota Depok (Saring, 2019:56). Kebutuhan sarana pendidikan merupakan satu dari sekian banyaknya sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh pemerintahan Kota Depok. Keberadaan sekolah yang berada dalam naungan pemerintah Kota Depok, pada perkembangannya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akses dunia pendidikan masyarakat Kota Depok. Sekolah swasta sejatinya telah hadir di Kota Depok dan memberikan



WIKSA: PROSIDING PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

kesempatan bagi masyarakat Kota Depok untuk mendapatkan akses ke dalam dunia pendidikan. Diawali dari munculnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kasih pada tahun 1956, kemudian SMA Kasih dan SMK Pemuda secara berturut-turut pada tahun 1983 dan tahun 1988. Sekolah-sekolah ini merupakan sekolah-sekolah yang dibangun oleh Yayasan Cornelis Chastelin (YLCC).

Seiring dengan dibukanya pembangunan perumahan (Perumnas) di Kota Depok, kemunculan sekolah-sekolah swasta di Kota Depok semakin bertambah. Tercatat sekolah Mardiyuana, Sekolah Santo Pius, kemudian disusul oleh kemunculan Pondok Pesantren Al-Awwabin di Sawangan Depok telah menjadi pondasi terbentuknya sekolah milik swasta di Kota Depok dengan bernafaskan keagamaan. Kemudian sekolah-sekolah swasta yang bernuasa nasionalis muncul seperti sekolah Budi Utomo,

Sekolah Ganesha Putra, Sekolah Pendidikan Tugu Ibu dan sekolah yang dibangun oleh Organisasi PGRI secara berturut-turut muncul sejak tahun 1988 hingga tahun 1997. Memasuki tahun 1998, Krisis ekonomi menerjang Indonesia, dan memberikan dampak berupa runtuhnya kehidupan ekonomi masyarakat di Indonesia. Krisis ekonomi yang mendera Indonesia menjadi langkah untuk memperbaiki tata kelola Kota dan tata kelola manajemen pendidikan secara umum di Kota Depok. Awal tahun 2000 menjadi periode perbaikan manajemen sekolah yang dilakukan oleh sekolah-sekolah swasta di Kota Depok, seiring pula dengan perbaikan ekonomi masyarakat Kota Depok.

Bangkitnya kemampuan finansial pemerintahan Kota Depok untuk dapat mengelola kehidupan Kota, banyak memberikan pengaruh terhadap pelayanan pendidikan di Kota Depok. Hal ini kemudian membuat sekolah-

sekolah swasta harus bersaing atau berlomba dengan sekolah-sekolah lain baik berstatus negeri maupun swasta, dalam mendapatkan calon peserta didik baru disetiap tahunnya. Menghadapi beratnya persaingan dalam mendapatkan calon peserta didik baru, hal ini kemudian akan memaksakan sekolah-sekolah swasta untuk mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki. Dalam memaksimalkan potensi ini akan berkaitan dengan cerminan orientasi sekolah yang membuka jurusan-jurusan baru sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Dalam orientasi ini, sekolah swasta harus mampu memikat orang tua peserta didik dengan memberi jaminan meningkatkan potensi sumber daya manusia (SDM) seiring majunya peradaban teknologi maju (revolusi industri 3.0), seperti komputerisasi dalam proses belajar mengajar.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode sejarah yang memiliki tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan penulisan. Dalam prosesnya artikel ini menggunakan sumber primer yang berasal dari dokumen pemerintah Kota Depok, dan juga sumber sekunder yang berasal dari buku-buku sejarah, surat kabar, dan artikel. Penulisan sejarah dalam artikel ini menggunakan pendekatan strukturistik, yang menekankan kepada peran *Agency* dalam prosesual peristiwa sejarah. Teori *Agency* yang digunakan, diambil dari penjelasan *Agency* milik Anthony Giddens, yang menjelaskan bahwa *Agency* memiliki kemampuan untuk menghadapi struktur yang ketat, karena dalam ketatnya struktur tetap memberikan peluang bagi *Agency* untuk dapat bertindak mengubah struktur (Giddens).



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pendidikan di Kota Depok Pada Tahun 1990-an

Pendidikan pada masa kekuasaan Orde Baru menjadi salah satu kebijakan politik dan pemerintahan yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pendidikan pada masa ini dijadikan salah satu sektor utama yang menyokong pembangunan ekonomi Orde Baru. Target utama pembangunan pendidikan nasional pada Repelita I (1969-1974) adalah pendidikan dasar 9 tahun yang meluas dalam waktu 15 tahun, serta perbaikan kualitas, akses, dan relevansi pendidikan yang semakin terarah demi peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia (Ali, 2009:16). Tetapi jika dilihat dalam Repelita II (1974-1979), strategi kebijakan pendidikan nasional meliputi empat butir, yaitu: peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan kesempatan

memperoleh pendidikan, relevansi pendidikan, dan efisiensi pendidikan (Yamin, 2009: 99). Jika dilihat proses yang berlangsung konsep pendidikan nasional ini bertahan cukup lama, bahkan masih diterapkan hingga akhir masa pemerintahan Orde Baru.

Dalam pelaksanaannya pendidikan dasar 9 tahun ternyata masih cukup sulit untuk dijalankan pada masa Orde Baru, sehingga program pendidikan ini direduksi menjadi program Wajib Belajar 6 Tahun dengan target pengentasan pendidikan dasar hingga lulus Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau jenjang pendidikan lain yang sederajat. Program Wajib Belajar 6 Tahun yang diresmikan pada tahun 1984 dicanangkan untuk meneguhkan dan mewujudkan komitmen pemerintah Orde Baru dalam upaya pemerataan kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh pendidikan dasar. Program ini pun mencapai hasil yang

diharapkan hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun sehingga program sebelumnya, yakni Wajib Belajar 9 Tahun, dirasa sudah bisa untuk diterapkan kembali.

Pada tanggal 2 Mei 1994 bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional, Presiden Soeharto secara resmi mencanangkan pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun. Sejak saat itulah, program pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun diterapkan sebagai gerakan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pelaksanaan program Wajib Belajar 9 Tahun meliputi program Wajib Belajar 6 Tahun ditingkat SD/MI, dan dilanjutkan dengan program Wajib Belajar 3 Tahun ditingkat SMP/MTs (Djojodibroto, 2004: vii). Program Wajib Belajar 9 Tahun bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan oleh setiap orang untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Menurut Soedijarto (2008), kendati tidak sama persis dalam pelaksanaannya, program pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun juga diterapkan oleh negara-negara maju, seperti di Inggris dan Jerman (Soedijarto, 2008:3). Dua negara mapan di Eropa tersebut menempatkan jenjang pendidikan menengah sebagai tahapan untuk menyiapkan generasi muda yang secara akademik memenuhi syarat sebelum memasuki dunia kerja ataupun untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jika dilihat dari pemaparan diatas, penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu adalah sebagai upaya meningkatkan Indeks Peningkatan Manusia (IPM) serta layanan pendidikan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang berusia sekolah 6-15 tahun secara bermutu. Oleh sebab itu program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu menjadi salah satu program prioritas bagi pembangunan pendidikan di Kota Depok (<https://disdik.depok.go.id>).



WIKSA: PROSIDING PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Dalam melaksanakan program Wajib Belajar 9 Tahun ini, masyarakat Kota Depok mengalami kesulitan untuk menjalankannya. Dampak krisis moneter yang terjadi sejak Juli tahun 1997 di Kota Depok telah membawa akibat yang serius dimana pendapatan masyarakat menurun drastis, harga-harga barang juga naik tajam sehingga mencapai tingkat yang sebagian warga masyarakat sulit menjangkaunya. Menurut para ahli, jika krisis ekonomi ini dibiarkan, akan terjadi proses pembodohan bangsa secara massal. Pasalnya akibat krisis ekonomi ini, banyak masyarakat yang tidak bisa menjangkau harga layanan pendidikan. Secara khusus dampak krisis ekonomi yang terjadi pada masyarakat dapat dikelompokkan menjadi beberapa kemungkinan, diantaranya: a) kemampuan ekonomi rendah dengan aspirasi pendidikan rendah; b) kemampuan ekonomi rendah dengan aspirasi pendidikan tinggi; c) kemampuan

ekonomi tinggi dengan aspirasi rendah; dan d) kemampuan ekonomi tinggi dengan aspirasi pendidikan tinggi (Gie, 1999:30-31).

Kemampuan menyekolahkan anak bagi masyarakat Kota Depok yang kemampuan ekonominya rendah sangat rentan terhadap dampak krisis moneter. Keadaan ini bisa dipahami karena struktur pengeluaran mereka sebagian besar adalah untuk memenuhi kebutuhan primer. Hanya sebagian kecil pengeluaran mereka yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder, seperti untuk membiayai pendidikan (Wibisono, 1998:40). Oleh karena itu begitu penghasilan mereka menurun atau bahkan hilang, maka untuk pembiayaan pendidikan akan dikurangi bahkan dihentikan. Lebih dari itu, bagi kelompok ini, penurunan dan hilangnya pendapatan keluarga akan menggerakkan mereka untuk mengarahkan kegiatan anak kepada sesuatu kegiatan produktif bagi

keluarga, daripada mengirim mereka ke sekolah. Kecendrungan ini terjadi apabila angka putus sekolah atau *drop out* (DO) sebagian dari kelompok ini meningkat.

Bagi kelompok masyarakat Kota Depok yang kemampuan ekonominya rendah tetapi aspirasi pendidikan tinggi, dampak krisis ekonomi mirip sebagaimana kelompok pertama. Kelompok ini akan mengalami penurunan pendapatan atau bahkan hilang, yang menyebabkan mereka tidak lagi memiliki uang untuk membiayai anak-anaknya sekolah. Hanya dikarenakan memiliki aspirasi pendidikan yang tinggi, mereka tidak langsung *drop out*, melainkan mempertahankan anak-anak mereka tetap bersekolah. Tetapi, upaya mempertahankan anak-anak mereka untuk tetap bersekolah ada batasnya, karena itu ancaman *drop out* membayangi kelompok ini.

Bagi kelompok yang mempunyai kemampuan ekonomi tinggi tetapi aspirasi pendidikan rendah, dampak krisis ekonomi

relative tidak terlalu terasa. Pendapatan kelompok ini juga akan menurun atau bahkan hilang, tetapi apa yang dimiliki masih dapat menopang kehidupannya dengan baik dalam waktu yang relatif lama. Demikian pula konsumtif, primer, dan sekunder bukan merupakan masalah bagi kelompok ini. Namun, karena aspirasi pendidikan mereka ini rendah, kenaikan biaya pendidikan bagi kelompok ini akan menekankan kemauan dan semangat menyekolahkan anak-anaknya. Kebijakan yang diperlukan supaya kelompok ini tetap mempertahankan anak-anaknya melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi adalah menunda kenaikan uang sekolah dari iuran sekolah yang lain. Sampai segala batas waktu tertentu yang diperkirakan gejala ekonomi dapat dikendalikan, maka segala kebijakan untuk menaikkan biaya sekolah perlu ditimbang masak-masak.

Bagi kelompok masyarakat Kota Depok yang kemampuan ekonominya tinggi tetapi aspirasi pendidikan tinggi, dampak krisis



ekonomi tidak nampak. Artinya kemauan dan kemampuan mereka menyekolahkan anak-anak mereka tidak akan terganggu. Kemampuan ekonomi mereka bahkan harus bisa dimanfaatkan bagi kebutuhan yang lain. Oleh karena itu, kebijakan yang diperlukan untuk kelompok ini adalah mendorong mereka agar aktif membantu siswa yang tidak mampu, terutama yang ada di sekolah masing-masing seperti Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) yang dibentuk di lingkungan sekolah-sekolah swasta dan negeri Kota Depok.

B. Adaptasi Sekolah-Sekolah Swasta Pada Periode Awal Reformasi di Kota Depok

Memasuki era reformasi jumlah sekolah di Kota Depok semakin bertambah, hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk di Kota Depok. Pasca berangsur-angsur pulihnya keadaan ekonomi Indonesia akibat krisis ekonomi di tahun 1998, situasi ekonomi di ibu Kota Jakarta semakin

membah. Pulihnya keadaan ekonomi di Kota Jakarta, membuat gelombang kedatangan kaum urban, baik dari pulau Jawa maupun dari luar pulau Jawa tidak dapat dihindari. Upaya untuk memperbaiki keadaan ekonomi dari daerah asal, membuat para kaum urban menjadikan Kota Jakarta sebagai Kota utama memperbaiki kehidupan ekonomi (Wibisono, 1998: 55).

Kota Depok seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian menjadi pilihan bagi kaum urban dimana Kota ini menjadi kantong pemukiman para pendatang urban pada periode tahun 2000-an. Kebutuhan para kaum urban pendatang di Kota Depok tidak hanya untuk bermukim semata akan tetapi juga kebutuhan-kebutuhan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan sarana publik lainnya. Berkaitan dengan keberadaan sekolah-sekolah yang telah berdiri di Kota Depok sejak sebelum krisis ekonomi tahun 1998, tidak dapat mengakomodir tuntutan

kebutuhan penduduk Kota Depok (Irsyam, 2017:94).

Pemerintah Kota Depok menyadari tuntutan kebutuhan dunia pendidikan bagi penduduk Kota Depok semakin tinggi, maka dari itu pemerintah Kota Depok melalui Badan Perencanaan Pembangunan Kota Depok (Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Depok no. 1/99) membangun beberapa sekolah negeri tambahan baik dari jenjang sekolah dasar hingga jenjang sekolah menengah atas. Terhitung sejak tahun 2000-an, keberadaan sekolah-sekolah di Kota Depok, yang berada dibawah naungan pemerintah Kota Depok semakin bertambah. Namun keberadaan jumlah sekolah yang berada dibawah naungan pemerintah Kota Depok atau berstatus sekolah negeri, pada prakteknya belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk di Kota Depok. Maka dari itu kehadiran sekolah-sekolah swasta sebagai pendukung dan memberikan pelayanan pendidikan bagi penduduk Kota Depok, tidak dapat lagi dihindari.

Berdasarkan perbandingan jumlah siswa yang terdapat dalam sekolah-sekolah negeri dan swasta di Kota Depok hanya terdapat perbedaan sejumlah 30.000 siswa. Data tersebut menunjukkan bahwa tuntutan pemenuhan kebutuhan akses terhadap dunia pendidikan di Kota Depok, dapat dipenuhi oleh sektor swasta (*private sector*). Keberadaan sektor swasta dalam memberikan kesempatan kepada penduduk Kota Depok untuk mendapatkan akses pendidikan menunjukkan, betapa pentingnya dan besar peran sektor swasta terhadap keberlangsungan dunia pendidikan di Kota Depok (Tabloid Suara Kota, 09 Juni 2004).

Kehadiran sekolah-sekolah swasta di Kota Depok yang tersebar dalam tiga jenjang kependidikan (dasar, menengah dan atas), terbukti telah memberikan banyak manfaat bagi penduduk dan pemerintah Kota Depok. Menurut sumber keberadaan sekolah swasta di Kota Depok telah meningkatkan jumlah partisipasi sekolah anak dan membantu



WIKSA: PROSIDING PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

meningkatkan angka melek huruf bagi warga Depok (bappeda.depok.go.id; Tabloid Suara Kota, 09 Juni 2004). Berdasarkan sumbangan sekolah-sekolah swasta terhadap peningkatan sumber daya manusia di Kota Depok, WaliKota Depok Badrul Kamal memberikan penghargaan kepada sekolah-sekolah swasta yang dinilai membantu pemerintah Kota Depok dalam dunia pendidikan (Tabloid Suara Kota, 09 Juni 2004).

Meningkatnya jumlah pengguna atau peserta didik di Kota Depok, maka membuat sekolah-sekolah swasta di Kota Depok berbenah untuk menjadi sekolah yang berkualitas. Maka dari itu sejak tahun 2004, isu-isu mengenai dunia pendidikan bergeser dari swastanisasi dunia pendidikan menuju isu sekolah-sekolah berstandar nasional dan internasional. Keadaan ini tentu membuat sekolah-sekolah yang memiliki modal besar mampu untuk mempertahankan keberadaannya,

sementara itu sekolah-sekolah swasta yang bermodalkan kecil dan menengah harus bersusah payah untuk dapat beradaptasi ditengah perubahan isu pendidikan di Kota Depok.

KESIMPULAN

Krisis moneter yang terjadi sejak Juli tahun 1997 telah membawa akibat yang serius terhadap sendi-sendi perekonomian nasional hingga tingkat Kota Depok. Pendapatan masyarakat menurun drastis, harga-harga barang juga naik tajam sehingga mencapai tingkat yang sebagian warga masyarakat sulit menjangkaunya. Bahkan menurut para ahli, jika krisis ekonomi ini dibiarkan, akan terjadi proses pembodohan bangsa secara massal. Pasalnya akibat krisis ekonomi, banyak masyarakat yang tidak bisa menjangkau harga layanan pendidikan. Kemampuan menyekolahkan anak bagi masyarakat Kota Depok yang kemampuan ekonominya rendah

sangat rentan atas dampak krisis moneter. Keadaan ini bisa dipahami karena struktur pengeluaran mereka sebagian besar adalah untuk memenuhi kebutuhan primer. Hanya sebagian kecil pengeluaran mereka yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder, seperti untuk membiayai pendidikan.

Pada saat memasuki era reformasi, jumlah sekolah di Kota Depok semakin bertambah, hal tersebut terjadi karena terjadi peningkatan jumlah penduduk di Kota Depok. Pasca berangsur-angsur pulihnya keadaan ekonomi Indonesia pasca krisis ekonomi di tahun 1998, situasi ekonomi di ibu Kota Jakarta semakin membaik. Kota Depok kemudian menjadi pilihan bagi kaum urban, untuk menjadi kantong pemukiman bagi pendatang urban pada periode tahun 2000-an. Kebutuhan para kaum urban pendatang di Kota Depok tidak hanya untuk bermukim semata akan tetapi juga kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti :

pendidikan, kesehatan, dan sarana publik lainnya.

Kehadiran sekolah-sekolah swasta di Kota Depok yang tersebar dalam tiga jenjang kependidikan (dasar, menengah dan atas), terbukti telah memberikan banyak manfaat bagi penduduk dan pemerintah Kota Depok. Menurut sumber keberadaan sekolah swasta di Kota Depok telah meningkatkan jumlah partisipasi sekolah anak dan membantu meningkatkan angka melek huruf bagi warga Depok. Berdasarkan sumbangan sekolah-sekolah swasta terhadap peningkatan sumber daya manusia di Kota Depok, Wali Kota Depok Badrul Kamal memberikan penghargaan kepada sekolah-sekolah swasta yang dinilai membantu pemerintah Kota Depok dalam dunia pendidikan.

Meningkatnya jumlah pengguna atau peserta didik di Kota Depok, maka membuat sekolah-sekolah swasta di Kota Depok berbenah untuk menjadi



WIKSA: PROSIDING PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

sekolah yang berkualitas. Maka dari itu sejak tahun 2004, isu-isu mengenai dunia pendidikan bergeser dari swastanisasi dunia pendidikan menuju isu sekolah-sekolah berstandar nasional dan internasional. Keadaan ini tentu membuat sekolah-sekolah yang memiliki modal besar mampu untuk mempertahankan keberadaannya, sementara itu sekolah-sekolah swasta yang bermodalkan kecil dan menengah harus bersusah payah untuk dapat beradaptasi ditengah perubahan isu pendidikan di Kota Depok.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. (2009). *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*. Jakarta: Grasindo.

Djojodibroto, R. D. (2004). *Tradisi Kehidupan Akademik*. Yogyakarta: Galangpress.

Kwik Kian Gie. (1999). *Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Irsyam, T. W. M. (2017). *Sejarah Depok 1950-1990 Berkembang dalam Bayang-bayang*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

Peraturan Daerah Kota Depok No. 1 tahun 1999 tentang Perencanaan dan Pembangunan Kota Depok.

Saring. (2019). *Dua Kota Satu Atap: Kebijakan Pemukiman Penduduk Kota Jakarta dan Depok (1970-an Hingga Akhir 1990-an)*, dalam Jurnal Sosio e-kons, Vol. 11, No. 1, April 2019.

Soedijarto. 2008. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Tabloid Suara Kota, 09 Juni 2004.

Wibisono, C. (1998). *Menelusuri Krisis Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Winarno, B. (2014). *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Jakarta : CAPS.



WIKSA: PROSIDING PENDIDIKAN SEJARAH
UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Yamin, M. (2009). *Menggugat Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Ar Ruz Media.

<https://disdik.depok.go.id>

bappeda.depok.go.id